

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Financial Distress

Brigham (2003) menyebutkan bahwa *financial distress* atau kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukan, hal ini dapat dilihat dari arus kas yang mengindikasikan bahwa perusahaan tidak lagi dapat membayar kewajibannya.

Darsono dan Ashari (2005) menyebutkan bahwa *financial distress* atau kesulitan keuangan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan.

Gamayuni (2011) menyebutkan bahwa *financial distress* adalah keadaan kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin merupakan awal dari terjadinya kebangkrutan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa *financial distress* adalah sebuah periode kondisi yang dialami oleh sebuah perusahaan, dimana perusahaan tersebut tidak mampu lagi membayarkan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, biasanya terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan.

Hanafi (2016) menyebutkan bahwa kesulitan keuangan perusahaan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kesulitan keuangan jangka pendek yang disebut kesulitan keuangan ringan seperti tidak mampunya perusahaan membayar gaji karyawannya

dan juga tidak mempunya perusahaan membayar bunga utangnya. Hal ini tentunya juga bisa menjadi besar jika tidak ditangani dengan benar.

Tingginya tingkat hutang yang melebihi jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya *financial distress*. Hanafi (2016) menyebutkan ada banyak hal yang menyebabkan kesulitan keuangan pada sebuah perusahaan, diantaranya adalah:

1. Kekurangan pengalaman operasional
2. Pengalaman tidak seimbang antara keuangan, produksi dan fungsi lainnya
3. Manajemen yang tidak kompeten
4. Penyelewengan
5. Bencana alam
6. Kealpaan
7. Dan juga alasan lainnya yang tidak ketahui

Pada sektor usaha kecil Hanafi (2016) menyebutkan bahwa beberapa hal juga dapat memicu kesulitan keuangan, seperti:

1. Struktur permodalan yang tidak mencukupi
Hal ini berdampak pada kurangnya modal untuk membeli barang-barang modal seperti mesin dan peralatan-peralatan usaha. Dampak lainnya juga dapat dilihat dari kurangnya modal untuk memanfaatkan barang persediaan yang dijual dengan potongan kuantitas atau jenis potongan lainnya.
2. Penggunaan peralatan dan metode bisnis yang ketinggalan zaman
Kita semua tentunya tahu bahwa zaman sangat mempengaruhi tingkat pemasaran sebuah produk. Peralatan dan metode bisnis yang ketinggalan zaman berpengaruh pada gagalnya perusahaan menerapkan pengendalian persediaan, tidak dapatnya perusahaan melakukan pengendalian kredit dan kurang memadainya pencatatan keuangannya.
3. Tidak adanya perencanaan bisnis
Bisnis tanpa perencanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Jika sebuah perusahaan tidak mempunyai perencanaan bisnis maka yang terjadi adalah ketidakmampuan perusahaan mendeteksi dan memahami perubahan pasar serta perubahan kondisi ekonomi. Ketidakmampuan perusahaan menyiapkan rencana untuk situasi darurat atau diluar dugaan perusahaan, misalnya anjloknya harga produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Ketidakmampuan perusahaan mengantisipasi dan merencanakan kebutuhan keuangan.

4. Kualifikasi pribadi

Kualifikasi pribadi juga menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh sebuah perusahaan, hal ini meliputi kurangnya pengetahuan bisnis, tidak mau bekerja terlalu keras, tidak adanya pembagian tugas dan wewenang dan ketidakmampuan perusahaan memelihara hubungan baik dengan konsumen.

Fachrudin (2008) menyebutkan bahwa penyebab *financial distress* dijelaskan dalam Trinitas penyebab kesulitan keuangan, yaitu:

1. *Neoclasical Model*

Financial distress dan kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya didalam perusahaan tidak tepat. Manajemen yang kurang bisa mengalokasikan sumber daya (aset) yang ada di perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan.

2. *Financial Model*

Pencampuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan *liquidity constraints*. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka pendek.

3. *Corporate Governance Model*

Menurut model ini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Hal ini menjadikan tidak efisien sehingga mendorong perusahaan menjadi *Olt of the Market* sebagai konsekuensi dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan.

Dari penjelasan para ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa *financial distress* terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

1. Tidak ada etos kerja yang baik
2. Buruknya pelayanan perusahaan tersebut
3. Kurangnya modal untuk produksi
4. Terjadinya penyelewengan dalam lingkup manajemen
5. Terjadinya bencana yang tidak dapat diprediksi
6. Tingkat kepuasan konsumen
7. Alasan-alasan lain yang tidak dapat dijelaskan

2.1.2 Prediksi Kondisi *Financial Distress*

Sumber informasi yang paling penting dan harus dimiliki oleh perusahaan yang akan menjelaskan tentang posisi keuangan sebuah perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan dalam sebuah perusahaan dan akan menjadi satu sumber penting yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat adalah

laporan keuangan. Laporan keuangan dalam sebuah perusahaan terdiri dari laporan rugi laba, neraca, laporan arus kas dan pengungkapan laporan keuangan.

Informasi tentang laporan keuangan yang tersaji akan menjadi lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan jika laporan keuangan tersebut dikonversi menjadi informasi yang berguna secara ekonomis. Laporan keuangan ini bisa berguna jika telah dilakukan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini dapat dilakukan dengan mengukur rasio-rasio keuangannya.

Financial distress adalah sebuah fase yang terjadi sebelum masa kebangkrutan terjadi pada sebuah perusahaan. Pihak perusahaan sangat penting untuk mengetahui kondisi *financial distress* perusahaannya sejak dini, hal ini bisa menjadi tolak ukur tentang tindakan-tindakan yang harus diambil oleh perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya kebangkrutan dalam perusahaan tersebut. Terdapat banyak literatur yang memprediksi kebangkrutan sebuah perusahaan dengan berbagai macam metode, namun hanya sedikit literatur yang memprediksi kondisi *financial distress* sebuah perusahaan. Hal ini terjadi karena sulitnya mengartikan secara langsung tanda-tanda awal terjadinya *financial distress*.

Prediksi *financial distress* perusahaan menjadi hal yang harus diperhatikan oleh banyak pihak, diantaranya:

- 1) Pemberi pinjaman. Hal ini berkaitan dengan keputusan yang akan diambil oleh pemberi pinjaman, apakah akan memberikan pinjaman kepada pihak perusahaan atau tidak.
- 2) Investor. Hal ini dapat menjadi acuan apakah seorang investor itu akan menanamkan modalnya pada perusahaan itu atau tidak.
- 3) Pembuat peraturan. Perlunya mengetahui prediksi *financial distress* bagi seorang pembuat aturan adalah untuk mengetahui dan mengawasi tentang

kesanggupan perusahaan tersebut untuk membayar hutang dan menjaga kestabilan perusahaannya.

- 4) Pemerintah. Prediksi *financial distress* sangat penting diketahui oleh pemerintah sebagai acuan untuk membuat peraturan, misalnya perundang-undangan tentang perekonomian dan sebagainya.
- 5) Auditor. Prediksi *financial distress* menjadi sebuah acuan dalam pemberian penilaian oleh auditor, apakah perusahaan tersebut dikatakan wajar, wajar dengan pengecualian atau bahkan tidak wajar.
- 6) Manajemen perusahaan. Prediksi *financial distress* tentunya menjadi hal yang sangat penting diketahui oleh manajemen perusahaan sebagai hal utama yang menjadi acuan untuk pengambilan tindakan untuk mengantisipasi kebangkrutan.

2.1.3 Jenis dan Kategori *Financial Distress*

Gamayuni (2011) menyatakan bahwa terdapat 5 bentuk kesulitan keuangan atau *financial distress* yaitu sebagai berikut:

- *Economic Failure*
Yaitu suatu keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya perusahaan termasuk biaya modal.
- *Business Failure*
Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan menghentikan kegiatan operasionalnya dengan tujuan mengurangi (akibat) kerugian pada kreditor.
- *Technical Insolvency*
Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
- *Insolvency in Bankruptcy*
Yaitu suatu keadaan dimana nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar aset perusahaan.
- *Legal Bankruptcy*
Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum.

Fahmi (2011) secara umum membagi *financial distress* atau kesulitan keuangan menjadi 4 kategori sebagai berikut:

- *Financial Distress* Kategori A (Sangat Tinggi dan Benar-Benar Membahayakan)
Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut atau *pailit*. Pada kategori ini kemungkinan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi *bankruptcy* dan menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar perusahaan.

- *Financial Distress* Kategori B (Tinggi dan Dianggap Berbahaya)
 Pada posisi ini perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual atau dipertahankan. Perusahaan juga harus memikirkan berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan *merger* (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan). Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat dalam posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pensiun dini pada beberapa karyawannya yang dianggap tidak layak lagi untuk dipertahankan.
- *Financial Distress* Kategori C (Sedang dan Dianggap Masih Bisa Menyelamatkan Diri)
 Pada kondisi ini perusahaan sudah harus melakukan perombakan berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang diterapkan, bahkan jika perlu perusahaan juga perlu melakukan perekrutan tenaga ahli baru yang memiliki kompetensi yang tinggi untuk ditempatkan di posisi-posisi strategis yang bertugas mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan, termasuk target dalam menggenjot perolehan laba kembali.
- *Financial Distress* Kategori D (Rendah)
 Pada kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami *fluktuasi financial temporer* yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal termasuk lahirnya dan dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat.

Berdasarkan beberapa sumber diatas, peneliti menyimpulkan bahwa *financial distress* terbagi dalam 4 kategori, yaitu:

1. Kategori Sangat Parah
 yaitu ketika perusahaan dinyatakan bangkrut secara hukum sehingga perusahaan tidak lagi dapat menjalankan perusahaannya dan tidak bisa memenuhi semua kewajibannya yang telah memasuki jatuh tempo. Terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran di perusahaan tersebut.
2. Kategori Parah
 Yaitu ketika perusahaan tidak dapat membayarkan kewajibannya yang telah jatuh tempo dan perusahaan melakukan pengurangan karyawan serta jumlah produksi barang yang diproduksi barang tersebut.
3. Kategori Sedang
 Yaitu ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat membayarkan kewajibannya namun perusahaan melakukan inovasi untuk kembali mendongkrak penjualannya agar mendapat laba yang besar sehingga dapat kembali membayar kewajibannya.
4. Kategori Aman

Yaitu ketika perusahaan dinyatakan tengah mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat membayarkan kewajibannya, perusahaan melakukan inovasi agar penjualan produknya dapat meningkat dan perusahaan melakukan penyesuaian kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan serta perusahaan menambah tenaga ahli yang dapat menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan.

2.1.4 Metode Pengukuran Altman Z-Score

Metode Altman Z-Score mulai populer untuk menganalisis kesehatan perusahaan dan menentukan kecenderungan perusahaan mengalami kebangkrutan dalam tempo satu atau dua tahun yang akan datang. Metode ini dikembangkan oleh seorang professor dari Universitas New York yang bernama Edward Altman pada tahun 1968. Perumusan metode ini pada awalnya berdasarkan data dari 66 perusahaan manufaktur terbuka yang 33 perusahaannya merupakan perusahaan yang mengalami kebangkrutan dengan total aset lebih dari 1 juta dollar. Pada perkembangannya, Altman mengembangkan dua model tambahan yang khusus untuk menganalisis perusahaan manufaktur yang tertutup dan perusahaan yang bukan perusahaan sektor manufaktur.

Perhitungan Altman Z-Score sepenuhnya menggunakan angka-angka yang tertera dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Ada 7 data yang diambil dari laporan neraca dan laporan rugi laba perusahaan yang akan menghasilkan 5 rasio keuangan. Hal ini dijelaskan dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Data Keuangan dalam Perhitungan Altman Z-Score

Data Keuangan	Ditemukan dalam	Cara Perhitungan
<i>Earning before Interest and Tax (EBIT)</i>	Laporan Rugi Laba	Pendapatan kotor – bunga- pajak
<i>Total Assets</i>	Neraca	Total aset lancar + total aset tidak lancar
<i>Net Sales</i>	Laporan Rugi Laba	Terdapat dalam laporan rugi laba

<i>Market (or Book) Value of Equity</i>	Neraca (<i>Stockholders Equity</i>)	Nilai pasar (untuk perusahaan terbuka) dan nilai buku (untuk perusahaan tertutup) dari seluruh saham
<i>Total Liabilities</i>	Neraca	Total utang lancar + total utang tidak lancar
<i>Working Capital</i>	Neraca	Total aset lancar – total utang lancar
<i>Retained Earning</i>	Neraca (<i>Stockholders Equity</i>)	Laba ditahan

Sumber: ABC- Amega, How to Calculate Altman Z-Score, Maret 2010

Hasil penelitian Altman tentang *financial distress* menghasilkan sebuah persamaan matematis yang dapat digunakan untuk menghitung prediksi seberapa besar kemungkinan bangkrut atau tidaknya sebuah perusahaan.

Rumus persamaan Altman Z-Score adalah sebagai berikut:

$$Z = 1,2 WCTA + 1,4 RETA + 3,3 EBITTA + 0,6 MVEBVL + 0,999 STA$$

Keterangan:

- WCTA : *Working Capital to Total Asset* (Modal kerja dibagi total aset)
 RETA : *Retained Earning to Total Asset* (Laba ditahan dibagi total aset)
 EBITTA : *Earning Before Interest and Taxes to Total Asset* (Laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset)
 MVEBVL : *Market Value of Equity to Book Value of Liability* (Nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku hutang)
 STA : *Sales to Total Assets* (Penjualan dibagi total aset)

Kondisi di Indonesia dengan tempat asal model persamaan ini dibuat yaitu di Amerika Serikat, tentulah berbeda. Salah satu perbedaan yang dapat dilihat adalah sedikitnya perusahaan di Indonesia yang *go-public*. Jika perusahaan tidak *go-public*, maka nilai pasar saham tidak bisa dihitung. Untuk mengganti nilai pasar, Altman kemudian menggunakan nilai buku saham biasa dan saham preferen sebagai salah satu komponen variabel bebasnya, dan kemudian mengembangkan model diskriminan kebangkrutan dan memperoleh model sebagai berikut ini:

$$Z_i = 0,717 \text{ WCTA} + 0,847 \text{ RETA} + 3,107 \text{ EBITTA} + 0,42 \text{ MVEBL} + 0,998 \text{ STA}$$

Dimana:

WCTA= (Aktiva Lancar – Utang Lancar) : Total Aktiva

RETA = Laba yang Ditahan : Total Aktiva

EBITTA= Laba Sebelum Bunga dan Pajak : Total Aktiva

MVEBL= Nilai Buku Saham Biasa dan Saham Preferen : Nilai Buku Total Hutang

STA = Penjualan : Total Aset

Hasil perhitungan nilai Z-Score dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Interpretasi Nilai Z-Score dengan Nilai Buku Saham untuk Indonesia

Nilai Z-Score	Interpretasi
$Z > 2.90$	Tidak Mengalami <i>Financial Distress</i>
$1.20 < Z < 2.90$	<i>Gray Area</i> /Daerah Rawan
$Z < 1.20$	Mengalami <i>Financial Distress</i>

Sumber : Altman (1968)

Berdasarkan dari tabel 2.2 tentang interpretasi nilai Z-Score dengan nilai buku, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Z kritis ditemukan jika nilai Z kurang dari 1,2. Jika perusahaan memiliki nilai Z diatas 1,2 maka perusahaan tersebut diperkirakan tidak mengalami *financial distress*.

Perhitungan Altman Z-Score berdasarkan pada komponen data-data keuangan perusahaan yang tertera pada laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan kombinasi dari data keuangan suatu perusahaan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan dan dibuat dalam periode masa tertentu.

PSAK No. 1 (IAI, 2009) menjelaskan bahwa:

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Baridwan (2004:17) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dan merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

PSAK No.1 (IAI, 2009) menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

1. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis untuk menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat atau tanggal tertentu. Neraca disebut juga laporan posisi keuangan. Giri (2017:65) menyatakan bahwa informasi yang tercantum dalam neraca menjadi dasar dari:

- (a) penentuan *rate of return*
- (b) pengevaluasian struktur modal perusahaan
- (c) penentuan likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan.

2. Laporan Rugi Laba

Efraim (2017:43) menyatakan bahwa laporan rugi laba adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pengukuran kesuksesan operasi bisnis suatu entitas selama periode tertentu. Laporan rugi laba juga sering disebut sebagai laporan penghasilan. Laporan rugi laba menjadi salah satu laporan yang sangat penting karena laporan ini memberikan informasi kepada kreditur dan investor untuk memprediksi jumlah, waktu dan ketidakpastian aliran kas pada masa yang akan datang.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

PSAK No.01 menjelaskan bahwa laporan perubahan ekuitas menunjukkan informasi tentang:

- Total laba rugi komprehensif selama suatu periode: total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali.
- Komponen ekuitas: pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif (sesuai PSAK 25)
- Komponen ekuitas: rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode dan mengungkapkan terpisah masing-masing perubahan yang timbul dari: (a) laba rugi, (b) setiap pos pendapatan komprehensif lain, dan (c) transaksi dengan pemilik: menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

4. Laporan Arus Kas

Efrain (2017:79) menyatakan bahwa laporan arus kas disusun dengan tujuan memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pembayaran kas yang dilakukan perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas melaporkan tentang:

- Informasi tentang jumlah kas yang diperoleh dari kegiatan operasi suatu entitas.
- Informasi tentang jumlah kas yang diperoleh dari kegiatan investasi.
- Informasi tentang jumlah kas yang diperoleh dari kegiatan pendanaan dan kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode waktu tertentu.

PSAK No.2 tahun 2009 menjelaskan bahwa Laporan arus kas adalah laporan untuk:

- a) Mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas), dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah
- b) Menilai kemampuan suatu entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flows*) dari berbagai entitas
- c) Meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas (meniadakan pengaruh perlakuan akuntansi untuk transaksi dan peristiwa yang sama)
- d) Indikator dari jumlah, waktu dan kepastian arus kas masa depan
- e) Meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga.

2.1.5 Aset Tetap Tak Berwujud

Giri (2017) menyatakan bahwa aset tetap tak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik. Namun keberadaan aset tetap tak berwujud ini memiliki keuntungan di masa depan yang

akan diperoleh perusahaan dari kepemilikan aset tersebut. Aset tetap tak berwujud tidak memiliki wujud fisik dan bukan merupakan instrument keuangan.

Soemarso (2002:59) menyatakan bahwa aset tetap tak berwujud adalah aktiva tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan. Aktiva tetap tak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan.

Surya (2012:201) menyatakan bahwa aset tetap tak berwujud adalah aset nonmoneter yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh suatu entitas.

Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) menyatakan bahwa aktiva yang tidak berwujud mencerminkan hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa aset tetap tak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dilihat bentuknya namun memiliki kontribusi yang penting bagi perusahaan.

PSAK No.19 (revisi 2010) mendeskripsikan aset tetap tak berwujud secara rinci, sebagai berikut:

Tabel 2.3 PSAK No.19 (Revisi 2010)

Perihal	PSAK No. 19 (revisi 2010)
Tujuan PSAK no. 19 (Revisi 2010)	<ul style="list-style-type: none"> - PSAK harus diterapkan dalam akuntansi untuk aset tetap tak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada standar lainnya. - PSAK no. 19 (Revisi 2010) mewajibkan entitas untuk mengakui aset tetap tak berwujud jika, dan hanya jika, kriteria-kriteria tertentu terpenuhi.

	<ul style="list-style-type: none"> - PSAK no. 19 (2010) juga mengatur cara mengukur jumlah tercatat dari aset tak berwujud dan menentukan pengungkapan yang harus dilakukan bagi aset tak berwujud.
<p>Ruang Lingkup</p>	<p>PSAK harus diterapkan dalam akuntansi untuk aset tak berwujud, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aset tak berwujud yang diatur oleh PSAK lain. - Aset keuangan seperti yang didefinisikan dalam PSAK 50 (Revisi 2010): instrumen keuangan: penyajian. - Hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka eksplorasi, pengembangan dan penambangan mineral, minyak, gas alam (sebagaimana diatur dalam PSAK 33 (Revisi 2011). <p>Aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup pada pertambangan umum dan PSAK 64: Aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral.</p>
<p>Definisi Aset Tetap Tak Berwujud</p>	<p>Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Mempunyai tiga karakteristik mendasar untuk bisa menentukan apakah pengeluaran sumber daya maupun penciptaan liabilitas yang dilakukan oleh entitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan atau peningkatan sumber daya tak berwujud dapat dikategorikan sebagai aset tak berwujud, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keteridentifikasian (identifiability) - Pengendalian (control) - Manfaat ekonomis masa depan (future economic benefits)
<p>Pengakuan dan pengukuran awal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aset tak berwujud harus diakui jika dan hanya jika: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. 2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. - Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis masa depan, entitas harus menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan yang

	merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang berlaku sepanjang masa manfaat aset tersebut.
	- Aset tak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan.
Akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis	Sesuai dengan PSAK 22 (Revisi 2009): kombinasi bisnis, jika aset tak berwujud diperoleh dalam kombinasi bisnis, biaya dari aset tak berwujud adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisinya.
Pengeluaran lebih lanjut yang muncul dari kegiatan penelitian dan pengembangan	Pengeluaran penelitian dan pengembangan yang: <ul style="list-style-type: none"> - Berhubungan dengan proyek penelitian dan pengembangan yang sedang berjalan pada perolehan secara terpisah atau dalam kombinasi bisnis dan diakui sebagai aset tak berwujud. Terjadi setelah akuisisi proyek tersebut harus dibukukan sesuai dengan paragraf 53-61.
Goodwill yang dihasilkan secara internal	Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset.
Tahap riset	Entitas tidak boleh mengakui aset tak berwujud yang timbul dari riset (Atau dari tahapan riset pada proyek internal). Pengeluaran untuk riset (atau tahap riset pada suatu proyek internal) diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
Tahap pengembangan	Suatu aset tak berwujud yang timbul dari pengembangan (Atau dari tahap pengembangan pada suatu proyek internal) diakui jika, dan hanya jika, entitas dapat menunjukkan semua hal berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual. - Niat untuk menyelesaikan aset tak berwujud tersebut dan menggunakan atau menjualnya. - Kemampuan untuk

menggunakan atau menjual aset tak berwujud tersebut.

- Bagaimana aset tak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomis masa depan. Antara lain entitas harus mampu menunjukkan adanya pasar bagi keluaran aset tak berwujud atau pasar atas aset tak berwujud itu sendiri, atau jika aset tak berwujud itu akan digunakan secara internal, entitas harus mampu menunjukkan kegunaan aset tak berwujud tersebut.
- Tersedianya sumber daya teknis, keuangan dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut.
- Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tak berwujud selama pengembangannya.



Pengakuan beban

- Pengeluaran untuk aset tak berwujud harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali:
 - 1) Pengeluaran itu merupakan bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan.
 - 2) Pos tersebut diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis yang berbentuk akuisisi dan tidak dapat diakui sebagai aset tak berwujud, apabila demikian halnya pengeluaran tersebut, merupakan bagian dari *goodwill* pada tanggal akuisisi.
 - Pengeluaran atas unsur aset tak berwujud yang awalnya diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari biaya
-

Pengukuran setelah pengakuan	<p>(harga perolehan) aset tak berwujud di kemudian hari.</p> <p>Jika suatu aset tak berwujud dicatat dengan menggunakan model revaluasi, maka semua aset lainnya dalam kelas tersebut harus dicatat dengan menggunakan model yang sama, kecuali tidak ada pasar aktif untuk aset tersebut.</p>
Masa manfaat	<ul style="list-style-type: none"> - Sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tak berwujud terbatas atau tak terbatas dan jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas. - Masa manfaat suatu aset tak berwujud yang timbul dari kontrak atau hak legal lainnya tidak dapat lebih panjang dari masa kontrak atau hak legal lainnya, tapi dapat lebih pendek tergantung dari periode kapan aset dapat digunakan entitas. Jika kontrak atau hak legal lainnya memiliki batasan yang dapat diperbarui, masa manfaat dari aset tak berwujud juga diperbarui hanya apabila terdapat bukti yang mendukung pembaruan masa manfaat tidak menimbulkan biaya yang signifikan. Masa manfaat suatu hak yang dibeli ulang sebagai aset tak berwujud dalam suatu kombinasi bisnis adalah sisa masa kontrak yang mana hak-hak tersebut berlaku dan periode yang diperbarui tidak termasuk.
Periode amortisasi dan metode amortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai depresiasi sebuah aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Amortisasi

	<p>harus dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang diinginkan manajemen. Amortisasi harus dihentikan pada waktu mana yang lebih dahulu antara ketika aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (termasuk dalam kelompok aset lepasan yang digolongkan dalam aset yang dimiliki untuk dijual).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi yang dibebankan setiap periode harus diakui dalam laporan laba rugi kecuali PSAK 19 (Revisi 2010) atau PSAK lainnya mengizinkan atau mensyaratkan amortisasi dengan dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya.
<p>Nilai residu aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas</p>	<p>Nilai residu suatu aset tak berwujud seharusnya diasumsikan sama dengan nol, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tersebut pada akhir manfaatnya. - Ada pasar aktif bagi aset tersebut sehingga nilai residu aset dapat ditentukan dengan mengacu pada harga yang berlaku dipasar tersebut dan terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa pasar yang aktif tersebut akan tetap tersedia sampai akhir masa manfaat aset.
<p>Penelaahan periode amortisasi dan metode amortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas</p>	<p>Periode amortisasi dan metode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, maka periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi</p>

	manfaat ekonomis dari aset, metode amortisasinya harus diubah untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut.
Aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas	Aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak boleh diamortisasi.
Penelaahan dan penilaian aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas	Masa manfaat suatu aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak berwujud yang tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan.
Penghentian dan pelepasan aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya apabila: <ul style="list-style-type: none"> 1) Dalam (proses) pelepasan 2) Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. - Keuntungan atau kerugian muncul dari penghentian pengakuan suatu aset tak berwujud harus ditetapkan sebagai perbedaan antara nilai bersih pelepasan (jika ada) dan nilai wajar aset. Hal tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya.

Sumber: PSAK 19 (Revisi 2010), (IAI, 2010)

Giri (2017) menyatakan bahwa aset tetap tak berwujud harus diakui jika:

- a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut.
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal (PSAK 19).

PSAK 19 menjelaskan beberapa cara pemerolehan dan penciptaan aset tetap tak berwujud, diantaranya:

- a. Pemerolehan secara terpisah
- b. Pemerolehan dari kombinasi bisnis
- c. Izin pemerintah
- d. Pertukaran aset
- e. *Goodwill* tercipta secara internal
- f. Aset tetap tak berwujud lain yang tercipta secara internal

Wijaya (2010) menyatakan bahwa aset tetap tak berwujud mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu:

1. Kurang memiliki eksistensi fisik
Tidak seperti aktiva berwujud property, pabrik dan peralatan, aset tetap tidak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan atau *privilege* yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya.
2. Bukan merupakan instrument keuangan
Aset seperti piutang usaha, obligasi, saham, investasi jangka panjang serta deposito bank tidak memiliki substansi fisik, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai aset tetap tak berwujud. Aset ini bukan merupakan instrument keuangan dan menghasilkan nilainya dari hak (klaim) untuk menerima kas atau ekuivalen kas dimasa depan.
3. Bersifat jangka panjang dan menjadi subjek *amortisasi*
Aset tetap tak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun. Investasi dalam aset ini biasanya dibebankan pada periode masa mendatang melalui beban *amortisasi* periodik.

Aset tetap tak berwujud memiliki elemen mendasar yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu *intangibles* internal yang berada didalam perusahaan, melekat pada karyawan dalam bentuk keterampilan, kerjasama tim, tata nilai, budaya perusahaan, reputasi dan teknologi. *Intangibles* eksternal berada diluar perusahaan, melekat pada konsumen dan *stakeholder* (para penyalur, distributor, pemerintah, komunitas) dalam bentuk *brand image*, *customer loyalty* dan dukungan.

2.1.6 Jenis-Jenis Aset Tetap Tak Berwujud

Jenis-jenis aset tetap tak berwujud menurut Rachmawati (2011):

1. *Patent* adalah hak khusus yang diterima oleh mereka yang mendapatkan penemuan-penemuan baru, baik itu berupa produk, sistem, pola ataupun formula-formula terbaru lainnya.
2. *Copyright* adalah hak khusus yang diberikan kepada pengarang, pencipta dan komponis untuk mempublikasikan dan menjual karangan-karangannya. Di Indonesia sendiri sudah memiliki UU tentang Hak Cipta sejak tahun 1990.
3. *Trade Mark/Trade Name* adalah pengakuan (perlindungan hukum) dari pemerintah terhadap penjual, cap label ataupun tanda-tanda lain dari perusahaan maupun produknya. Pengakuan ini biasanya diberikan selama perusahaan menggunakannya. Untuk menentukan umur penggunaan hak ini lebih banyak ditentukan oleh perusahaan/pemilik *Trade Mark* tersebut. Biasanya merk yang terkenal dapat dijual kepada pihak lain tetapi dengan diikuti pembayaran *royalty* yang biasanya didasarkan pada pendapatan penjualan.

4. *Franchise* adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha seperti memasarkan suatu produk dan jasa memakai merk perusahaan lain pada suatu daerah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu.
5. *Goodwill* adalah perusahaan yang memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu, kelebihan-kelebihan, maupun keuntungan lebih lainnya disebut memiliki *goodwill*. Kelebihan-kelebihan ini disebabkan oleh kemampuan, kualitas produk, letak yang strategis, dukungan pemerintah, kemampuan/reputasi manajemen, dan lain sebagainya. Suatu perusahaan yang memiliki *goodwill* belum tentu harus dibuat perkiraan *goodwill*. *Goodwill* hanya boleh dicatat apabila terjadi transaksi, misalnya melalui pembelian, masuk/keluar sekutu, *merger* akuisisi dan lain sebagainya.

Kieso, Etc (2002 :122-128) menyatakan bahwa aset tetap tak berwujud dikelompokkan menjadi 6 kategori, diantaranya:

1. Aset Tetap Tak Berwujud yang Terkait dengan Pemasaran
Aset ini biasanya digunakan dalam kepentingan pemasaran atau promosi produk dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh dari aset ini adalah merek dagang atau nama dagang, susunan dewan direksi pada surat kabar, nama domain internet dan perjanjian nonpersaingan.
2. Aset Tetap Tak Berwujud yang Terkait dengan Pelanggan
Aset ini dihasilkan dari interaksi dengan pihak luar. Contoh dari aset ini adalah daftar pelanggan, catatan pesanan atau catatan produksi dan hubungan dengan pelanggan yang terikat dengan kontrak maupun yang tidak.
3. Aset Tetap Tak Berwujud yang Berhubungan dengan Kontrak
Aset ini merupakan nilai dari hak yang muncul dari perjanjian kontrak. Contoh aset ini adalah perjanjian lisensi, ijin bangunan, hak siaran dan kontrak jasa atau pasokan. Bentuk umum dari aset ini adalah waralaba (*franchise*)
4. Aset Tetap Tak Berwujud yang Berhubungan dengan Teknologi
Aset ini berkaitan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Contoh aset ini adalah *patent* dan *trademark office*.
5. Aset Tetap Tak Berwujud yang Berhubungan dengan Seni
Aset ini termasuk hak kepemilikan naskah drama, karya sastra, karya musik, gambar-gambar, foto, materi video dan audiovisual. Contoh dari aset ini adalah hak cipta.
6. *Goodwill*
Aset ini biasanya terjadi dalam penggabungan usaha, biaya (harga beli) dibebankan, jika memungkinkan ke aset berwujud yang dapat diidentifikasi serta aset tetap tak berwujud bersih dan sisanya dicatat dalam akun aset tetap tak berwujud. Aset ini sering disebut sebagai aset yang paling tak berwujud dari aset tetap tak berwujud, karena *goodwill* hanya dapat diidentifikasi pada bisnis secara keseluruhan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa jenis aset tetap tak berwujud dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. Hak patent yang biasanya didapatkan perusahaan setelah mendaftarkan produknya pada instansi berwenang sehingga produk tersebut tidak bisa ditiru dengan merek yang sama oleh perusahaan lain. Hak patent ini biasanya berlaku selama 20 tahun.
2. Hak cipta, hak ini biasanya didapatkan atas sebuah karya yang diciptakan oleh perusahaan. Misalnya hak cipta untuk sebuah perusahaan penerbitan buku atau album rekaman. Jika ada pihak yang sengaja mengcopy isi dari karya perusahaan tersebut tanpa ijin resmi, maka pihak tersebut mendapatkan sanksi dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Waralaba, hak ini biasanya berupa bagi hasil antara pengelola dan pemilik lahan dengan presentase yang telah ditentukan diawal penandatanganan kontrak. Untuk batas waktunya tergantung dari kesepakatan. Misalnya sebuah toko waralaba dengan masa kontrak 25 tahun dan presentase keuntungan 25% pemilik lahan dan 75% pengelola.
4. Nama dagang, hak ini biasanya berupa hak dagang atau merek dagang yang tidak dapat ditiru oleh pihak lain. Misal perusahaan A dengan merek dagang “SHOPDRESS” yang sudah terdaftar secara resmi, ketika perusahaan tersebut mengeluarkan produk yang sangat laris di pasaran, sehingga banyak pihak yang mereplika produk tersebut dengan merek yang sama tanpa ijin dari perusahaan A, maka pihak tersebut dapat dikenakan sanksi dan denda yang berlaku sesuai perundang-undangan yang ada.
5. *Goodwill*
Aset ini biasanya berupa nilai plus yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Biasanya berupa letak perusahaan yang strategis, kualitas mutu produk yang diproduksi oleh perusahaan sehingga konsumen merasa puas pada produk tersebut. Kepuasan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut.

2.1.7 Hubungan Antara Aset Tetap Tak Berwujud dengan Financial Distress

Penelitian tentang pengaruh aset tetap tak berwujud terhadap *financial distress* tergolong baru namun banyak peneliti yang mengembangkan penelitian ini. Penelitian ini berawal dari Zane Swanson (2010) yang meneliti tentang aset tetap tak berwujud terhadap *financial distress* dengan menggunakan metode altman dengan variabel alternatifnya perusahaan yang tidak mempunyai aset tetap tak berwujud akan mempunyai nilai altman Zscore lebih rendah, yang artinya perusahaan tersebut akan mengalami *financial distress*.

Hanafi (2016) menyebutkan bahwa penyebab kesulitan keuangan dan kebangkrutan yang dialami perusahaan itu memiliki banyak variasi, diantaranya

adalah kepemilikan aset tetap tak berwujud. Hanafi (2016) menyebutkan bahwa aset tetap tak berwujud ini bisa berupa nama baik perusahaan yang dapat mempengaruhi konsumen untuk tetap membeli produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Hal tersebut menjadikan sebuah perusahaan sangat penting memiliki aset tetap tak berwujud. Nilai perusahaan juga menjadi hal sangat penting bagi perusahaan, karena dengan nilai perusahaan maka perusahaan yang terlanjur mengalami *financial distress* dapat menyakinkan kreditur atau investor untuk melakukan restrukturisasi dengan menggunakan jalur perbaikan formal (resmi dengan perundang-undangan).

Hanafi (2016) juga menyebutkan bahwa merek sebuah produk berpengaruh untuk menentukan perusahaan tersebut bangkrut atau tidak. Sebagai contoh, sebuah perusahaan kendaraan bermotor dapat memantau seberapa besar minat konsumen terhadap sepeda motor merek tertentu, maka jika ada beberapa merek di perusahaan tersebut misalkan Honda Beat, Honda Revo, Honda Astrea dan lain-lain, perusahaan dapat melihat produk mana yang sedang diminati oleh konsumen, maka perusahaan akan memproduksi merek tersebut lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Sedangkan perusahaan tidak akan lagi memproduksi Honda Astrea karena merek tersebut sudah jarang diminati oleh konsumen. Sehingga perusahaan Honda tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan.

Berdasarkan penelitian Altman (1968) diketahui bahwa perusahaan bisa saja mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan sebuah perusahaan. Hal ini tentu saja ada hubungannya dengan penggunaan aset. Aset tetap tak berwujud

salah satunya, aset ini memang tidak berwujud tapi dapat memberikan dampak untuk perusahaan tersebut. Maihafni (2016) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap tak berwujud memiliki nilai Z-Score yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki aset tetap tak berwujud. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang tidak memiliki aset tetap tak berwujud akan lebih cenderung dapat mengalami *financial distress* dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset tetap tak berwujud.

Maihafni (2016) juga menyatakan bahwa aset tetap tak berwujud mempunyai pengaruh terhadap terjadinya *financial distress*, karena semakin banyak aset tetap tak berwujud yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai Z-Scorenya, hal ini dapat memperkecil tingkat *financial distress* pada perusahaan tersebut.

2.1.8 Value Creating

Sebuah organisasi bisnis selalu dituntut untuk kreatif dalam menyampaikan kelebihan dan *knowledge* perusahaannya kepada *stakeholder* perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan juga dituntut untuk mampu mengkreasikan *value* perusahaannya kepada konsumen atau calon konsumennya. Berdasarkan pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa nyawa organisasi bisnis adalah *value creating activities*. Organisasi bisnis harus mampu mengelola dan mengkreasikan keunggulan perusahaannya pada keempat *value creating dimension matrix* yang terletak pada unsur *intangible assets*. *Value creating* memposisikan *knowledge* atau *intellectual* sebagai aset paling penting dan paling utama dalam sebuah perusahaan.

Menentukan *value* dari *intangible assets* secara objektif menjadi sulit dilakukan apabila terjadi transaksi akuisisi. Kesulitan ini tentu tidak dapat menjadi pembenaran bahwa informasi ini tidak perlu disampaikan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan dalam sebuah persamaan sebagai berikut:

$$\text{VALUE} = \text{BENEFIT} - \text{COST}$$

Dimana:

Value = Nilai yang dimiliki perusahaan

Benefit = Total pendapatan

Cost = Beban usaha (kecuali beban gaji dan tunjangan karyawan)

Value Creation dapat dilakukan dengan 2 cara:

- a) meningkatkan *benefit* atau *perceived benefit* melalui perbaikan kualitas, fungsi atau pencitraan
- b) memperbaiki struktur biaya melalui proses produksi, efisiensi, cara-cara baru, IT, integrasi sistem dan sebagainya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Apabila suatu perusahaan memperkuat aset tetap tak berwujudnya, maka perusahaan tersebut dapat memperkuat nilai perusahaan dimasa depan dan dapat menjauhkan nilai perusahaannya dari *financial distress*.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2011) dengan judul Pengaruh Aktiva Tetap Tak Berwujud (*Intangible Assets*) terhadap Financial Distress (Studi kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2007-2011) yang menyatakan perusahaan yang memiliki aset tetap tak berwujud nilai Z-Scorenya lebih tinggi dari perusahaan yang tidak memiliki aset

tetap tak berwujud. Hal ini berarti perusahaan yang memiliki aset tetap tak berwujud dapat terhindar dari *financial distress*.

Maihafni (2016) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Aset Tetap Tak Berwujud Terhadap Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap tak berwujud tidak berpotensi mengalami *financial distress*.

Maryati (2017) meneliti tentang Pengaruh Intangible Assets, Arus Kas Koperasi dan Leverage Terhadap Financial Distress, menyatakan bahwa aset tetap tak berwujud berpengaruh terhadap *financial distress*.

Calista (2017) meneliti tentang Pengaruh Aset Tetap Tak Berwujud dan Kinerja Keuangan Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI, menyatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan sehat aset tetap tidak berwujud dan kinerja keuangan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kondisi *financial distress* yang mungkin dialami oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Metode perhitungan yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Adelita Shanti Rachmawati (2011)	Pengaruh Aktiva Tetap Tak Berwujud (Intangible Assets) terhadap	Altman Z- Score	Berdasarkan perhitungan Z- Score, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap tak berwujud nilai Z-Scorenya

		Financial Distress (studi kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2007-2010)			lebih tinggi dari perusahaan yang tidak memiliki aset tetap tak berwujud. Hal ini berarti perusahaan yang memiliki aset tetap tak berwujud dapat terhindar dari <i>financial distress</i> .
2.	Maihafni (2016)	Pengaruh Aset Tetap Berwujud Terhadap Financial Distress (Studi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2011-2014)	Altman Z-Score	Z-	Perusahaan yang memiliki aset tetap tak berwujud tidak berpotensi mengalami <i>financial distress</i>
3.	Maryati Rahayu (2017)	Pengaruh Intangible Assets, Arus Kas Koperasi dan Leverage Terhadap Financial Distress	Altman Z-Score	Z-	Aset Tetap Tak Berwujud Berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i>
4.	Calista Mahardhika	Pengaruh Aset Tetap Berwujud dan Kinerja Keuangan Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI	Altman Z-Score	Z-	Kondisi keuangan perusahaan sehat aset tetap tidak berwujud dan kinerja keuangan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kondisi <i>financial distress</i> yang mungkin dialami oleh perusahaan.

Sumber: peneliti, 2019

2.3. Kerangka Berpikir

Sugiyono (2015:128) menyatakan bahwa kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan teori tersebut, penulis menggambarkan kerangka berpikirnya seperti dibawah ini:

Variabel IndependentVariabel Dependent**2.4. Hipotesis**

Ratna (2018) menyatakan bahwa hipotesis merupakan hubungan logis antara dua atau lebih variabel berdasarkan teori yang masih harus diuji kembali kebenarannya. Rachmawati (2011) dengan judul Pengaruh Aset Tetap Tak Berwujud (*Intangible Assets*) terhadap *Financial Distress* (Studi kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2007-2011) yang menyatakan perusahaan yang memiliki aset tetap tak berwujud nilai Z-Scorenya lebih tinggi dari perusahaan yang tidak memiliki aset tetap tak berwujud. Hal ini berarti perusahaan yang memiliki aset tetap tak berwujud dapat terhindar dari *financial distress*.

Berkaitan dengan perumusan permasalahan, landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis membuat hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

- H₀: Aset tetap tak berwujud (*intangible assets*) tidak berpengaruh terhadap *financial distress*
- H₁: Aset tetap tak berwujud (*intangible assets*) berpengaruh terhadap *financial distress* dimana perusahaan yang tidak memiliki *intangible assets* memiliki nilai Z-Score yang lebih kecil